

Kemiskinan Kepercayaan (*The Poverty of Trust*), Stok Modal Sosial dan Disintegrasi Sosial¹

Oleh

Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc²

*“Trust is something that enters into social relations when there is **role negotiability**, in what may be termed the “open spaces” of **roles and role expectations**...and...the image of society is basically formed by the interconnected networks of trust” (adapted from SELIGMAN, 2000)”*

Abstract

Trust is an essential element of social capital, which helps maintain the structure and the image of a community. A community suffering from a very serious trust insufficiency may have a paralyzing impact on the constitution of social-compactness and is urging it into a situation of what has then been known as the distrust society. The poverty of trust is a situation where a certain social entity suffers from trust deficiency making it difficult to maintain its social cohesiveness, social structure, and social integrity. In this regard, Indonesia may be seen as being a worthwhile exemplar, showing how distrust among the members of the society has been very deep since the fall of New-Order era. A considerable number of associative organizations have been breaking-up urging Indonesia to become a less integrative society.

Keywords: trust, social capital, social integration, and types of societies.

1. Latar Belakang: Kemiskinan *Trust* di Indonesia

Sejak kejatuhan rezim Orde Baru, Indonesia memasuki episode baru perjalanan kebangsaan yang dikenal kemudian sebagai “periode reformasi, demokrasi dan kebebasan”. Episode ini ternyata, dikemudian hari, menceritakan sebuah perjalanan dramatis yang dipenuhi oleh cerita memilukan serta kegetiran berkepanjangan yang membuat skeptis, bahkan oleh mereka yang memperjuangkan orde reformasi itu sendiri. Pada masa pasca hingar-bingar reformasi itu, prinsip-prinsip demokrasi baru yang seharusnya dibawakan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih beradab, rasional, penuh empati, egalitarian yang penuh kesantunan, ternyata malah menempuh perjalanan yang lain sama sekali. Demokrasi dan kebebasan telah diinterpretasikan dan dipakai sebagai alat pembenaran untuk memuaskan dan memaksakan keinginan individual dan

¹ Tulisan ini adalah perluasan dari tulisan atas topik yang sama yang diajukan untuk Seminar dan Kongres Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) bertemakan “Menggalang Masyarakat Indonesia Baru yang Berkemanusiaan”, Bogor 27-29 Agustus 2002.

² Staf Pengajar pada Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Alamat kontak via email: adharna1963@yahoo.com

keinginan suatu kelompok, tanpa memperhatikan kepentingan individu atau kelompok lain.

Pada masa reformasi, ketidakpastian hukum dan kecurigaan (*distrust*) di antara para warga justru makin mendalam dan menjadi ciri yang sangat kuat dalam membentuk gambaran sistem sosial-kemasyarakatan di Indonesia. Dalam pada itu, media massa mendokumentasikan secara lengkap peristiwa-peristiwa yang singkatnya dimaknai sebagai fenomena “main hakim-sendiri” di bidang hukum. Selain itu, proses-proses *dekonstruksi kekuatan negara* (yang direpresentasikan oleh otoritas Pemerintahan beserta aparatnya) berlangsung makin kuat dan meluas, sehingga melumpuhkan sendi-sendi pokok kehidupan kenegaraan (*nation state paralyzing process*) secara sistematis. Instansi sosial negara seolah tak kuasa menghadapi penguatan kekuasaan rakyat yang terus-menerus meningkat, terutama sejak berlalunya era kekuasaan represif Orde Baru. Media massa juga mendokumentasikan dengan baik, berita mengenai aparat kepolisian yang terus saja terbunuh ditangan massa rakyat tanpa alasan yang masuk akal dan logika hukum. Selain itu, media massa juga mencatat kasus-kasus pembakaran kantor pemerintahan daerah yang dilakukan oleh massa rakyat. Fakta ini mencerminkan rasa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan yang mendalam kepada negara. Rangkaian cerita di ruang administrasi publik memberikan gambaran serupa. Pada ruang ini terbentuk perasaan saling curiga-mencurigai dan ketidakpercayaan yang senantiasa menebal antara dua kawasan yang dulu disatukan oleh kekuatan sentralisme. Dua ruang publik yang berseteru itu adalah mereka yang berada di wilayah otoritas pusat (*center of power*) berhadapan dengan wilayah daerah sebagai kawasan pinggiran kekuasaan (*periphery of power*).

Sementara itu, di ruang ekonomi, publik menyaksikan berbagai **penyelewengan amanah** (*trust abuse*) yang telah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku ekonomi serta pengemban otoritas kekuasaan pengatur jalannya roda perekonomian dan pemerintahan. Perdagangan perkara pengadilan dan penyelesaian masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang seringkali berujung pada hasil yang tak terduga, sungguh telah melukai rasa keadilan publik. Masyarakat seolah sedang menghadapi era pembenaran-pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak pihak.

Demikianlah sehingga masa reformasi dan pasca reformasi merepresentasikan sebuah periode perkembangan masyarakat Indonesia yang secara sederhana dimaknai sebagai masa yang penuh dengan atmosfer **saling curiga, ketidakpercayaan** dan **kebencian** satu sama lain. Keadaan ini disebutkan oleh para analis sebagai babakan awal munculnya *the distrust society*, yang terus mendorong masyarakat Indonesia ke arah **perpecahan** dan **disintegrasi sosial** yang berkelanjutan. Dengan kata lain, derajat kepercayaan (*trust*) dalam masyarakat berada pada titik yang mengkhawatirkan (titik nadir) sehingga layak untuk

dianalogkan dengan keadaan ***kemiskinan rasa saling percaya sesama warga negara (the poverty of trust)***. Kemiskinan rasa saling percaya akan **merongrong kohesivitas sosial** dan **menghancurkan kehidupan-kehidupan sosial integratif** yang dipelihara dan bersendikan prinsip-prinsip asosiatif dan *trust*. Dalam arti kata lain, *the poverty of trust* bertanggung jawab dalam menjelaskan berlangsungnya **proses-proses sosial yang bersifat disintegratif** masyarakat di Indonesia saat ini.

Masih dalam konteks yang sama, mengikuti telaah politik-ekonomi dari perspektif yang dikembangkan oleh MANCUR OLSON dan DOUGLAS NORTH, Indonesia (dan beberapa negara sedang berkembang lainnya) bisa digolongkan ke dalam tipe masyarakat yang secara serius menghadapi ***lack of institutional and interpersonal trust***, yaitu situasi ***hilangnya rasa percaya seseorang pada orang lain***, dan ***hilangnya kepercayaan kepada kelembagaan publik*** maupun beragam bentuk *societal institutions* lainnya, sebagai akibat kronisnya moral koruptif. Miskinnya derajat kepercayaan tersebut menyebabkan masyarakat terpaksa harus menanggung ongkos ***inefisiensi kelembagaan*** (berupa peningkatan biaya transaksi) yang cukup berarti. Biaya untuk menstabilisasi kehidupan sosial-politik meningkat. *Extra public expenditure untuk menjaga keamanan dan ketentraman warga, seharusnya tak perlu ada, bila stok modal sosial berupa trust dalam masyarakat tersedia secara mencukupi.*

Kehilangan kepercayaan pada kelembagaan publik, secara akumulatif akan menyebabkan kinerja sebuah sistem sosial-kemasyarakatan (negara) menjadi sangat tidak efisien dan tidak efektif (lihat ROTHSTEIN, 2000). Pandangan dari perspektif politik ekonomi, secara jangka panjang, juga memprediksi adanya kecenderungan-kecenderungan yang akan lebih memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Secara singkat, hilangnya rasa saling percaya antar individu atau antar kelompok serta miskinnya *trust* dalam pengertian “ketidakmampuan mengemban amanah” (*a lower degree of social accountability*), baik secara interpersonal maupun institusional, akan berakibat pada dua hal penting. Kedua hal tersebut adalah: (a) proses **disintegrasi sosial** yang menajam; dan (b) proses pemburukan ekonomi sebagai akibat inefisiensi kelembagaan dan transaksi yang makin serius. Singkat kata, proses **kemiskinan ekonomi** dan penghancuran kelembagaan akan berlangsung berkepanjangan sebagai akibat **defisiensi stok modal sosial** dalam masyarakat.

Melihat pentingnya posisi dan peranan *trust* dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia, maka tak berlebihan bila diajukan saran perlunya aspek *trust* dimasukkan ke dalam setiap agenda studi sosiologi di Indonesia masa depan. Tulisan ini berupaya mengelaborasi secara singkat *trust* dalam kaitannya

dengan kesatuan serta karakter fisik (*physical quality*) sebuah entitas sosial masyarakat (Indonesia).

2. Memahami *Trust* dan Modal Sosial dalam Masyarakat

Perhatian pada kajian *trust* mulai menguat sejak konsep modal sosial mulai bergulir sebagai wacana akademik pemerhati sosiologi. Perkembangan selanjutnya, banyak thesis yang meneguhkan *trust* atau kepercayaan, sebagai bagian tak terpisahkan dari modal sosial dalam pembangunan. Benarkah *trust* merupakan isu baru dalam sosiologi? Jawabnya, “tidak”, karena akar pemikiran *trust* mulai muncul saat SIMMEL menggagas ide yang dicakup dalam tulisannya “*die Philosophie des Geldes*” (*the philosophy of money*). MÖLLERING (2001) yang berusaha mengelaborasi pemikiran SIMMEL tentang *trust*, mengkonseptualisasikan gagasan *trust* itu sebagai:

“a state of favorable expectation regarding other people’s actions and intentions. As such it is seen as the basis for individual risk-taking behavior, cooperation, reduced social complexity, order, and social capital”

Dari rumusan MÖLLERING itu *trust* membawa konotasi aspek **negosiasi harapan dan kenyataan** yang dibawakan oleh tindakan sosial individu-individu atau kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan. Ketepatan antara harapan dan realisasi tindakan yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam menyelesaikan amanah yang diembannya, dipahami sebagai tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan akan tinggi, bila penyimpangan antara harapan dan realisasi tindakan, sangat kecil. Sebaliknya, tingkat kepercayaan menjadi sangat rendah apabila harapan yang diinginkan tak dapat dipenuhi oleh realisasi tindakan sosial.

Rumusan dari MÖLLERING tersebut menjelaskan, paling tidak, enam fungsi penting kepercayaan (*trust*) dalam hubungan-hubungan sosial-kemasyarakatan. Keenam fungsi tersebut adalah:

1. **Kepercayaan** dalam arti *confidence*, yang bekerja pada ranah psikologis-individual. Sikap ini akan mendorong orang berkeyakinan dalam mengambil satu keputusan setelah memperhitungkan resiko-resiko yang ada. Dalam waktu yang sama, orang lain juga akan berkeyakinan sama atas tindakan sosial tersebut, sehingga tindakan itu mendapatkan legitimasi kolektif.
2. **Kerjasama**, yang berarti pula sebagai proses sosial asosiatif dimana *trust* menjadi dasar terjalannya hubungan-hubungan antar individu tanpa dilatarbelakangi rasa saling curiga. Selanjutnya, semangat kerjasama akan mendorong integrasi sosial yang tinggi.
3. **Penyederhanaan pekerjaan**, dimana *trust* membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kelembagaan-kelembagaan sosial. Pekerjaan yang menjadi sederhana itu dapat mengurangi biaya-biaya transaksi yang bisa jadi akan

sangat mahal sekiranya pola hubungan sosial dibentuk atas dasar moralitas ketidakpercayaan.

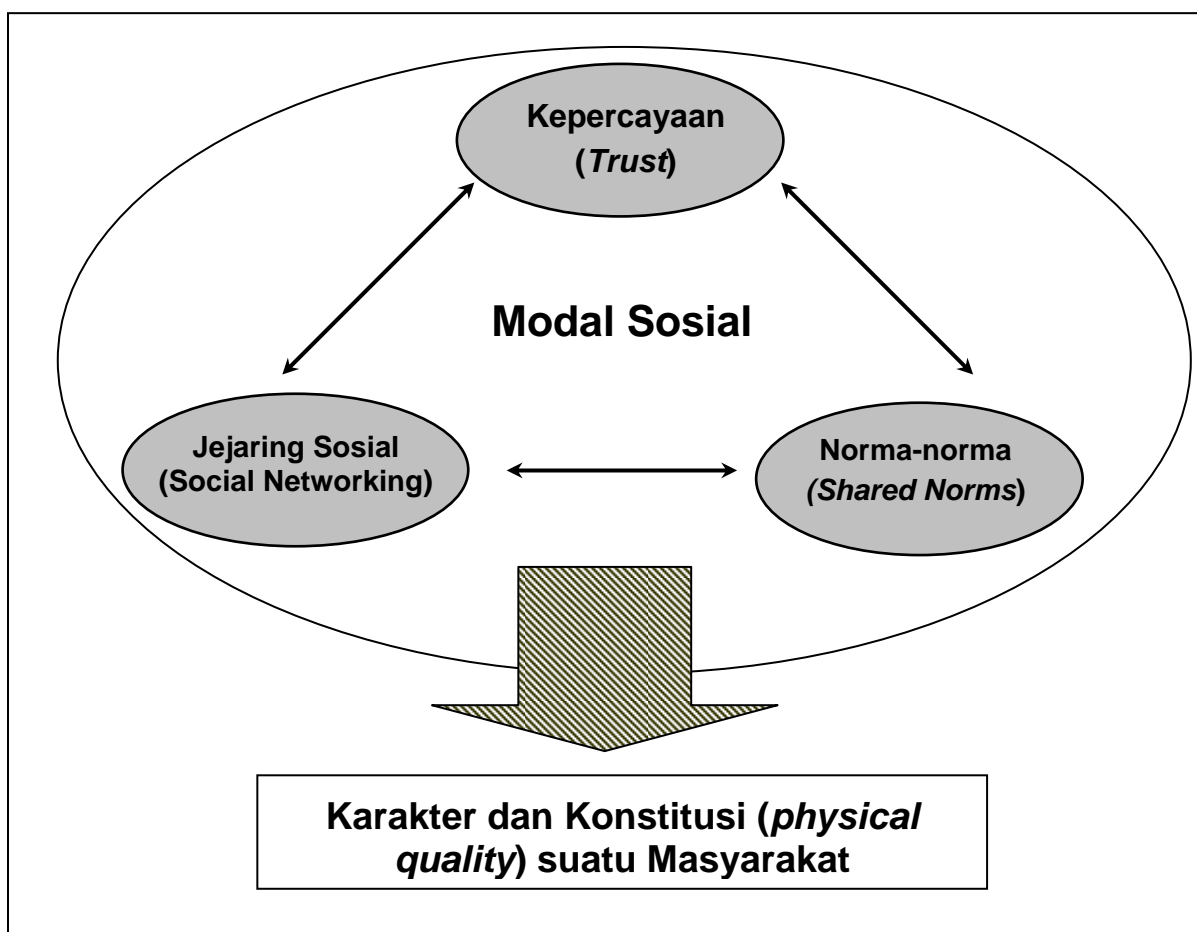
4. **Ketertiban.** *Trust* berfungsi sebagai *inducing behavior* setiap individu, yang ikut menciptakan suasana kedamaian dan meredam kemungkinan timbulnya kekacauan sosial. Dengan demikian, *trust* membantu menciptakan tatanan sosial yang teratur, tertib dan beradab.
5. **Pemelihara kohesivitas sosial.** *Trust* membantu merekatkan setiap komponen sosial yang hidup dalam sebuah komunitas menjadi kesatuan yang tidak tercerai-berai.
6. **Modal sosial.** *Trust* adalah asset penting dalam kehidupan kemasyarakatan yang menjamin struktur-struktur sosial berdiri secara utuh dan berfungsi secara operasional serta efisien.

Dalam konteks kepercayaan dan merujuk pada pendapat FUKUYAMA (2001), masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai *a society which seriously faces a shortage in social capital (trust)*. Defisiensi modal ini menyebabkan gagasan masyarakat sipil (*civil society*) yang berciri *democratic-civility* sulit dipenuhi dalam waktu segera. Karena, menurut FUKUYAMA, juga menurut penggagas dan penyokong ide modal sosial seperti PUTNAM (1995), *trust* adalah bagian penting dari **modal masyarakat untuk berdemokrasi** secara sehat. Manakala kehidupan demokrasi kemasyarakatan Indonesia berkembang dalam suasana saling-kecurigaan, saling tak percaya dan “mau menang sendiri”, maka disana segera ditengarai situasi ketidakcukupan modal sosial tersebut. Dalam konteks ini, PUTNAM (1995) mengatakan lebih lanjut bahwa:

“...community blessed with a **substantial stock of social capital**.**networks of civic engagement** foster sturdy **norms of generalized reciprocity** and encourage the emergence of **social trust**. Such networks facilitate coordination and communication, amplify reputations, and thus allow dilemmas of collective action to be resolved. When economic and political negotiation is embedded in dense networks of social interaction, incentives for **opportunism are reduced**. At the same time, networks of civic engagement embody past success at collaboration, which can serve as a **cultural template for future collaboration**. Finally, dense networks of interaction probably broaden the participants' sense of self, developing the "I" into the "we," or (in the language of rational-choice theorists) enhancing the participants' "taste" for collective benefits.”

Senada dengan rumusan dari PUTNAM, FUKUYAMA (2001) tak berlebihan bila mengatakan bahwa *trust* adalah salah satu “ruh” dari modal sosial. Semangat tersebut kelak akan menentukan dan memberikan corak budaya dari suatu sistem sosial kemasyarakatan.

Stok modal sosial yang mencukupi akan mendorong terbangunnya kerjasama dan berbagai bentuk *associational life* dalam hubungan individu-individu suatu masyarakat. Modal sosial juga **mereduksi biaya transaksi** yang seharusnya dikeluarkan dalam sebuah interaksi sosial. COLEMAN sebagai orang yang dipandang “memasarkan” konsep modal sosial – yang diajukan secara akademik pertama kali oleh ilmuwan Perancis BOURDIEU di dekade 1980an – secara luas, mengemukakan bahwa **trust** adalah salah satu esensi atau pilar penting konsep modal sosial selain pilar lainnya: **social networking** dan **norma-norma sosial** (*shared norms*) (lihat COLEMAN, 1994 serta periksa rumusan pada Gambar 1). Ketiga elemen penting modal sosial tersebut secara bersama-sama menentukan corak karakter (*physical quality*) suatu masyarakat.



Sumber: dikembangkan dari pemikiran penulis berdasarkan studi literatur (lihat teks)

Gambar 1. Kepercayaan (*Trust*) dan Elemen Lain Pembentuk Modal Sosial

3. Bentuk Hubungan *Trust* dan Modal Sosial

Bagaimanakah sesungguhnya bentuk hubungan *trust* dan *modal sosial* itu? Secara umum, modal sosial dipandang sebagai stok kapital yang penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat negara dunia ketiga maupun masyarakat

negara industri maju sekalipun. Analisis modal sosial, sebagai stok kapital dalam sebuah masyarakat memang sulit dipisahkan dari *theoretical way of thinking* yang dikembangkan oleh mazhab ekonomi neo-klasik³ yang mempostulatkan *utilitas maksimum* dan nilai *kegunaan ekonomi* sebagai thesis penting dalam teorinya. Namun demikian, konsep modal sosial yang diperkenalkan itu tidak dimanfaatkan sebagai instrumen penting kearah akumulasi material dan ekspansi modal serta maksimisasi keuntungan ekonomi, namun lebih dimaknai sebagai prasyarat terjadinya sebuah tata-ekonomi sehat yang rasional dan operasional. Artinya, modal sosial memberikan energi (*social energy*) bagi berjalannya sebuah sistem sosial-kemasyarakatan.

Dalam perspektif **ekonomi neo-klasikal**, individu-individu diberikan kesempatan untuk berpikir secara rasional dalam menentukan pilihan-pilihan atas tindakan sosial yang hendak diputuskannya. Dengan kata lain, setiap individu diberikan kebebasan untuk menimbang “untung-ruginya” dalam memanfaatkan stok modal sosial tersebut, terutama pada saat mereka hendak membuat keputusan membentuk suatu peradaban masyarakat yang efisien dan efektif. Artinya, modal sosial (bersama-sama dengan berbagai bentuk modal ekonomi lainnya seperti **uang, modal fisik** seperti tanah dan mesin-mesin, keterampilan dan kemampuan atau **human capital**, serta modal **lingkungan-ekologis**) bermakna instrumental bagi pencapaian sebuah tata-masyarakat ideal. Dengan perspektif demikian, maka penggunaan teori-teori pilihan rasional (*the rational choice theory*) menjadi sangat relevan dalam mengoperasionalisasikan dan memfungsikan modal sosial (lihat kajian teori pilihan rasional dari LITTLE, 1991; HECHTER dan KANAZAWA, 1997).

Dari perspektif **fungsionalisme**, modal sosial yang berintikan struktur ikatan-ikatan sosial yang berurat-berakar secara luas, memiliki makna yang bersifat multi-aras. PORTES (2000) menyebutkan bahwa **primordial social ties** sebagai bentuk modal sosial “primitif” yang telah ada sejak lama, dan dari sinilah pemaknaan akan modal sosial berlangsung. Ikatan primordialisme tersebut terjalin dalam jaringan dan ikatan kekeluargaan (catatan: dalam studi ketahanan ekonomi, ikatan ini dipandang penting sebagai bagian paling substansial dari **traditonal social security system** – lihat analisis SCOTT, 1972 dan SCOTT, 1976). Meski demikian, sementara kalangan analis memandang **cukup hati-hati** pemaknaan ikatan primordialisme sebagai hal yang positif secara normatif. Mengapa? Karena, sejarah mengajarkan, bahwa ikatan primordialisme telah disalahgunakan kemanfaatannya, antara lain oleh penguasa rezim Orde Baru. Pada masa itu, modal sosial telah dimanfaatkan secara

³ *Neoclassical economics is an approach in economics that analyze how individuals and firms behave to **maximize their own objective functions**, assuming that activities are coordinated by the price mechanism, and that markets clear so that the economy is in equilibrium at all times. In this type of model, macroeconomics is largely a study of the growth of factor supplies, which determine real output, and of the effects on the price level of growth in the quantity of money (Black, 1997).*

sepihak untuk menghasilkan apa yang kemudian dikenal sebagai sistem ekonomi berbasis *crony capitalism* yang sangat koruptif, sangat rapuh, yang kemudian mengantarkan Indonesia kepada masa krisis ekonomi berkepanjangan sejak 1998 hingga sekarang. Dengan kata lain, modal sosial telah dimanfaatkan secara “tidak layak”, dimana *trust* dan jejaring sosial dibangun secara eksklusif untuk membentuk imperium bisnis dan politik. Sementara itu, norma-norma sosial dibentuk oleh dan sesuai selera pemilik otoritas kekuasaan demi mengukuhkan kepentingan-kepentingan kroni tersebut di ruang bisnis dan politik. Dengan demikian, modal sosial pada masa itu telah dimanipulasi menjadi asset ekonomi kelompok tertentu dan bukan menjadi asset publik. Terlepas dari insiden buruk pemanfaatan modal sosial oleh kekuasaan ekonomi-politik Orde Baru, makna modal sosial dalam pengertian *traditional ties and social networking* tetap memiliki relevansi penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia umumnya.

Studi-studi kependudukan dan ketenagakerjaan, misalnya, menjelaskan betapa pentingnya **stok kapital** berupa **social-ties** ini dalam perburuan kesempatan kerja dan berusaha. Studi sektor informal dan urbanisasi desa-kota menemukan bukti-bukti absah adanya **job-seeking-based social networking** – berupa ikatan-ikatan sosial primordial diantara sekelompok individu – yang memudahkan mereka dalam mendapatkan kesempatan kerja. Adalah lazim, bahwa informasi tentang adanya kesempatan kerja biasanya beredar dan disampaikan secara antar-pribadi, sehingga ikatan pertemanan dan solidaritas sosial menjadi “jembatan” penting tersampainya informasi tersebut. Tanpa adanya “jembatan sosial” yang dibangun sejak awal, mustahil informasi yang sangat menguntungkan itu (*economically gainful occupation opportunity information*) akan sampai kepada seseorang yang membutuhkannya. Mekanisme ini berlangsung dengan baik terutama pada masyarakat, dimana hubungan personal dan “*face-to-face*” *communication* masih terpelihara dengan baik. Pada titik ini, “jembatan-jembatan” berupa ikatan-ikatan sosial itulah modal sosial yang sebenarnya.

Dalam kajian-kajian *informal economy* misalnya, banyak temuan mengungkapkan bahwa sektor informal perkotaan dunia ketiga tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari adanya **perluasan jaringan sosial desa-kota**. Jaringan tersebut memungkinkan sektor informal menyerap secara berlebihan tenaga kerja dari pedesaan. Dengan kata lain, kapasitas sektor informal yang “tak terbatas” dalam menyerap tenaga kerja disebabkan salah satunya oleh berfungsinya **stok modal sosial**. Modal sosial yang dipunyai oleh kaum migran desa-kota itu secara tepat dan **efisien dalam mengalokasikan sumberdaya** manusia ke unit-unit usaha yang masih memiliki kemampuan untuk berkembang (lihat kesimpulan-kesimpulan studi dari GEERTZ, 1968; GAUGHAN dan FERMAN, 1987; REENOY, 1990; LIN, 1999).

FUKUYAMA (2001) menyebut bentuk ikatan sosial yang tak tampak dipermukaan tersebut sebagai modal sosial yang bercirikan **less obviously social good**.

Sebagai “barang” yang bermakna ekonomi, modal sosial dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku. Dari sudut pandang **strukturalisme**, *trust* yang melandasi bangunan ikatan sosial itu akan lebih banyak menguntungkan elemen komunitas di **tingkat individual**, sehingga modal sosial bermakna sebagai asset sosial-ekonomi yang dikuasai dan operasional bagi individu. Namun demikian makna modal sosial tersebut tidaklah satu-satunya yang terpenting. Dalam perkembangannya, sebagian analis bersetuju memaknai ikatan-ikatan sosial tersebut dalam pengertian yang lebih progresif dan lebih positif dalam memberikan keuntungan tidak hanya kepada individu semata, namun lebih kepada **kolektivitas**. Disini modal sosial bermakna sebagai **modal kolektif** penopang bangunan sebuah sistem sosial.

Banyak bukti dari studi-studi sosiologi pembangunan yang menjelaskan bahwa jaringan ikatan sosial dibentuk secara sengaja sebagai infrastuktur komunitas – ***purposively constructed institutions***. Dari pemaknaan kedua ini, modal sosial memungkinkan orang-orang secara bersama menyongsong sumber-sumber kehidupan (*sources of livelihoods*) dengan lebih baik, sehingga terbentuk masyarakat yang lebih sejahtera secara sosial-ekonomi (ukurannya: harmonis secara sosial, bebas konflik, tingkat kerjasama yang tinggi, makmur secara ekonomi, demokratis, santun, egaliter, dan sebagainya).

Kedua makna di atas (makna individual maupun kolektif), menjadikan modal sosial bisa dipahami sama dan sebangun dengan konsep “***the strength of the weak ties***” – yang juga memiliki *fundamental moral* bernama *trust* – dari GRANOVETTER (1973). Konsep terakhir menjelaskan dan menekankan nilai penting “**jembatan-jembatan sosial**” di atas dalam mengakomodasi terbentuknya jejaring masyarakat yang solid. “Infrastruktur sosial” berupa jembatan penyambung satu entitas sosial dengan lainnya itu, memungkinkan terbentuknya hubungan resiprokal yang saling memberikan keuntungan (*reciprocal relations and mutual exchange*) serta kesatuan masyarakat lebih besar. Dengan lain kata, masyarakat yang besar di atas jaringan sosial yang kokoh hanya akan terbentuk bila, *trust* telah tertanam dan berfungsi secara operasional dan sesuai kesepakatan umum (dikukuhkan dan “dikawal” oleh norma-norma umum) diantara anggota masyarakat yang bersangkutan.

Sepaham dengan keyakinan ini, FRANK dan YASUMOTO (1998) kemudian memahami modal sosial dan kepercayaan (*trust*) secara praktikal sebagai sumberdaya, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“resources that actors/individuals or group may access....through social ties (institution)...based on trust, norms and institutions... these ties may affect one actor’s action or group’s action directed toward another which is based on the social structure in which the action is embedded.....”

Dengan pemahaman seperti ini, maka jelas bahwa kepercayaan adalah sumberdaya yang memiliki kemampuan substitusi maupun komplementer bagi sumberdaya atau modal lainnya. Bersama-sama dengan jenis modal lainnya, *trust* (modal sosial) ikut membentuk dan menentukan karakter fisik sebuah sistem sosial-kemasyarakatan.

4. Menuju *Trust Society* di Indonesia

Dengan memasukkan konsep *trust* dan modal sosial ini ke dalam pola hubungan sosial dan struktur sosial kemasyarakatan Indonesia, maka bangunan masyarakat Indonesia, semestinya akan bisa lebih baik di masa depan. Upaya mereduksi ciri moralitas *distrust* bisa dilakukan dengan cara menanamkan dan menumbuhkan *trust* pada beragam aras:

- ❖ **Trust pada aras individu**, disini *trust* terbentuk bila seseorang dapat memenuhi harapan orang lain sesuai janji (***promise keeping***) yang telah disepakati. Artinya, *trust* ditanamkan sebagai bagian tak terpisahkan dari moralitas dan adab yang selalu melekat pada karakter setiap individu.
- ❖ **Trust pada kelompok dan kelembagaan** (termasuk beragam bentuk regulasi dan beragam bentuk *commonly agreed institutional arrangement*), adalah proses bagaimana menjaga amanah (*promise keeping*) di tingkat grup sosial secara efektif. *Trust* pada tataran ini menjadi karakter moral kelompok. Hasilnya, *institutional trust* akan tercipta dengan baik.
- ❖ **Trust pada sistem yang abstrak** (ideologi, religi) membantu setiap individu dalam mengoperasionalkan *trust* dalam kehidupan kemasyarakatan.

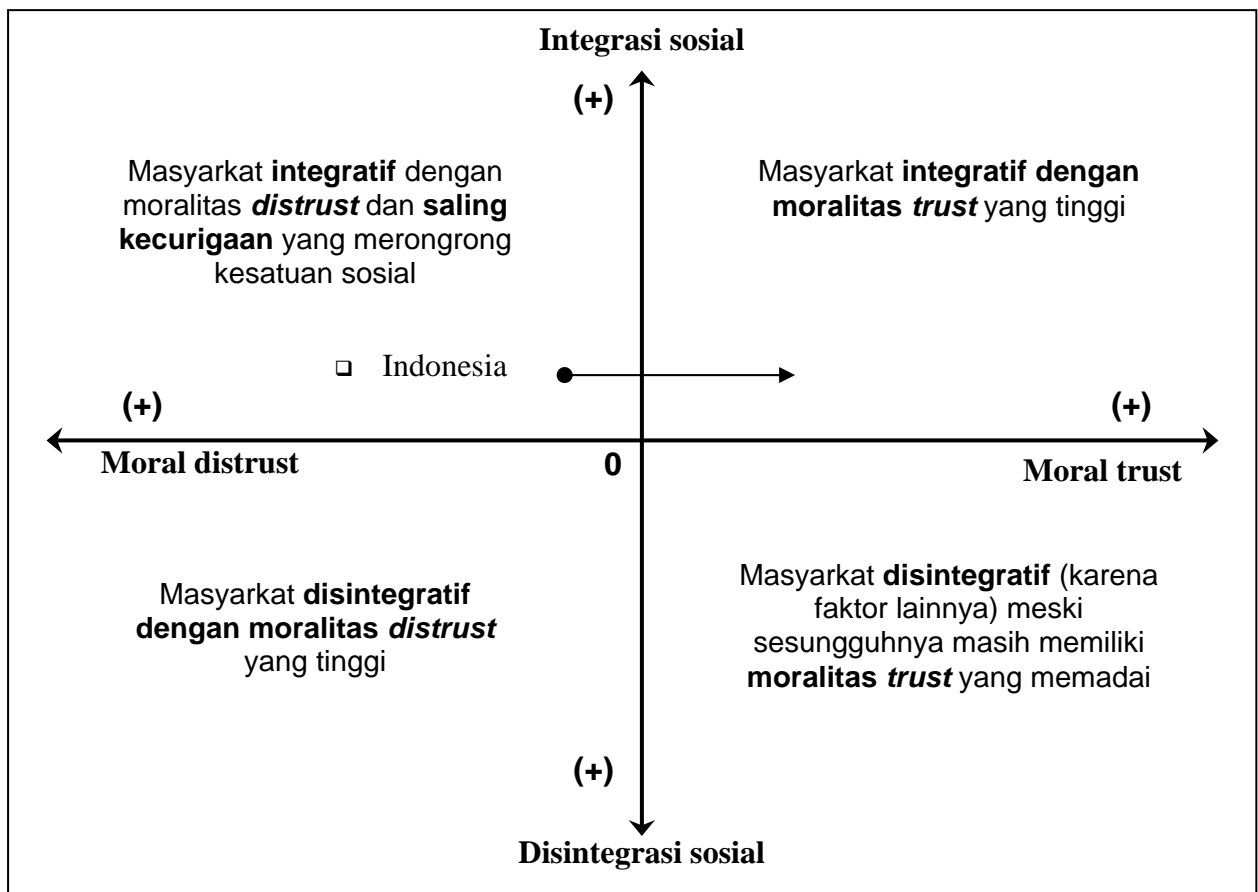
Bila moralitas *trust* menjelma menjadi perilaku bersama (*collective behavior*) atau **aksi kolektif** dari akumulasi gerakan individual, maka ***trust society*** tak mustahil akan mudah terwujud. Meski demikian, *trust* tak akan dapat berkembang dengan sendirinya tanpa adanya *favorable conditions*, yang mendukungnya untuk tumbuh dengan baik. Dalam hal ini, NARAYAN (1999) menilai bahwa *trust* adalah salah satu ***essential contributor factor*** yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan secara signifikan membantu terciptanya harmoni kehidupan sosial dan integrasi sosial (*a unity in diversity*). Untuk itu, NARAYAN menganggap penting adanya ***institusi formal*** dan ***informal*** yang menjamin *trust* agar berfungsi secara operasional. Dalam hal ini, kelembagaan informal yang bisa menumbuhkan *trust* adalah:

- ❖ *Interpersonal relations*, yakni hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang telah terbina sejak lama dan terbukti handal karena teruji oleh pengalaman-pengalaman.

- ❖ *Norms and values*, yang dikukuhkan bersama-sama serta diyakini dan ditaati oleh masyarakat.
- ❖ *Social sanctions*, yang mengikat orang atau kelompok agar tak berbuat semaunya.

Selanjutnya pada sisi kelembagaan formal, *trust* akan bisa tumbuh bila fungsi-fungsi organisasi seperti: lembaga pendidikan, lembaga hukum, pasar, ikut menyumbang “energi” bagi tumbuh dan berkembangnya atmosfer moralitas *trust* dalam masyarakat.

Dengan mengacu kepada kerangka konseptual **modal sosial** dan **trust** serta peranannya dalam menyatukan individu-individu atau kelompok menjadi satu kesatuan yang integratif dan harmonis, maka analisis ini diakhiri dengan mengajukan empat tipe (model) masyarakat. Tipe masyarakat hipotetis itu dibedakan berdasarkan kandungan *trust* dan derajat soliditas atau integrasi sosial masyarakatnya (lihat rumusan skematis sebagaimana diajukan pada Gambar 2).



Sumber: Pengembangan pemikiran penulis berdasarkan studi literatur (lihat teks)

Gambar 2. Empat Tipe Masyarakat Hipotetik dibedakan berdasarkan Moral *Trust* dan Tingkat Integrasi Sosialnya

Suatu kesatuan masyarakat diasumsikan dapat dibedakan ke dalam empat golongan berdasarkan derajat integrasi sosial dan kadar moralitas *trust*-nya. Keempat tipe atau golongan masyarakat tersebut diwakili oleh empat kuadran penting dimana setiap masyarakat berada. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di atas, kombinasi tipe masyarakat adalah:

- ❖ Masyarakat integratif namun dengan beragam derajat moral *distrust* yang bervariasi (kuadran kiri-atas).
- ❖ Masyarakat integratif dengan beragam derajat moral *trust* yang bervariasi (kuadran kanan-atas).
- ❖ Masyarakat disintegratif meski masih memiliki moral *trust* yang positif (kuadran kanan-bawah).
- ❖ Masyarakat disintegratif yang diwarnai oleh moral *distrust* (kuadran kiri-bawah).

Pada saat ini, sebagian komponen masyarakat Indonesia (terutama mereka yang tinggal di kawasan konflik: **Maluku, Poso, Sampit, Aceh**) sedang berada pada situasi dimana derajat integrasi sosial sangat rendah dan derajat *distrust* yang tinggi (lihat juga studi konflik sosial di Indonesia dari TADJOEDDIN, 2002). Pada wilayah itu, masyarakatnya ditandai oleh konflik sosial yang meluas dan rasa saling curiga yang amat-sangat tinggi (direpresentasikan oleh ciri masyarakat pada kuadran kiri-atas pada Gambar 2). Adalah cita-cita masyarakat Indonesia secara keseluruhan, untuk bisa segera mengakhiri suasana *chaotic* itu dan membawanya kepada keadaan yang lebih baik (di kuadran kanan-atas). Dimana pada kuadran tersebut masyarakat dicirikan oleh derajat integrasi sosial yang tinggi dan dipenuhi oleh rasa/sikap saling-kepercayaan yang tinggi pula (***trust society***).

Analisis dapat diturunkan ke aras meso dan mikro, seperti masyarakat kota, masyarakat desa, maupun entitas sosial yang lebih kecil lagi (komunitas lokal). Dengan cara demikian, keragaman ***konstitusi sosial*** masyarakat (berdasarkan *trust* dan *integrasi sosial*) serta faktor-faktor penentunya, dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Untuk itu, sejumlah agenda riset yang memanfaatkan kerangka pemikiran di atas bisa disusun lebih lanjut ke depan. Agenda ini seyogianya menjadi tantangan para ahli sosiologi Indonesia, hingga paling tidak selama satu dekade ke depan. Harapannya hanyalah satu, yaitu: menemukan (menciptakan) sebuah tatanan kemasyarakatan Indonesia yang lebih memiliki rasa saling kepercayaan, lebih mampu mengemban amanah, serta lebih bertanggung jawab kepada sesamanya.

Bahan Rujukan

BLACK, J. 1997. Oxford Dictionary of Economics. Oxford university Press. New York.

- BOURDIEU, P.** 1980. "Le Capital Social: Notes Provisoires", *Actes de La Recherche in Sciences Sociales*, 31:2-3
- COLEMAN, J. C.** 1994. *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press. Cambridge and London.
- FUKUYAMA, F.** 2001. Social Capital, Civil Society and Development. *Third World Quarterly*, Vol. 22/1, pp.7-20
- GAUGHAN, J. P.** and **FERMAN, L. A.** 1987. Toward an Understanding of the Informal Economy. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 493, pp. 15-25
- GEERTZ, C.** 1968. *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernisation in Two Indonesian Towns*. Chicago University Press. Chicago.
- GRANOVETTER, M.** 1973. The Strenghth of the Weak Ties, *American Journal of Sociology*, Vol. 78/6, pp. 1360-1380
- REENOY, P. H.** 1990. *The Informal Economy: Meaning, Measurement and Social Significance*. Elinkwijk bv. Utrecht, The Netherlands.
- TADJOEDDIN, M. Z.** 2002. *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia 1990-2001*. UNSFIR Working Paper No. 02/01-1. Jakarta.
- HECTER, M.,** and **KANAZAWA, S.** 1997. Sociological Rational Choice Theory. *Annual Review of Sociology*, Vol. 23, pp. 191-214
- LIN, N.** 1999. Social networks and Status Attainment. *Annual Review of Sociology*, Vol. 25, pp. 467-487
- LITTLE, D.** 1991. Rational Choice Models and Asian Studies. *Journal of Asian Studies*, Vol. 50/1, pp. 35-52
- MÖLLERING, G.** 2001. The Nature of Trust: From Georg Simmel to a Theory of Expectation, Interpretation, and Suspension, *Sociology*, Vol. 35/2, pp. 403-420
- NARAYAN, D.** 1999. *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty*. World bank. Washington D.C
- PUTNAM, R.** 1995. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy* Vol. 6/1, pp. 65-78
- ROTHSTEIN, B.** 2000. Trust, Social Dilemmas, and Collective Memories, *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 12/4, pp. 477-501
- SCOTT, J. C.** 1972. The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia. *Journal of Asian Studies*, Vol. XXXII/1, pp. 5-37
- SCOTT, J. C.** 1976. *The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press. New Haven.
- SELIGMAN, A. B.** 2000. *The Problem of Trust*. Princeton University Press. New Jersey.